

ABSTRAK

Mafia tanah merupakan kejahatan pertanahan yang melibatkan sekelompok orang yang saling bekerja sama untuk memiliki, menguasai tanah milik orang lain secara tidak sah. Para pelaku menggunakan cara yang melanggar hukum yang dilakukan secara terencana, rapi, dan sistematis. Berdasarkan Juknis Nomor 01/JUKNIS/D.VII/2018 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Mafia Tanah atau yang disingkat Satgas Mafia Tanah, merupakan tim yang dibentuk secara terpadu anggotanya terdiri dari Kementerian ATR/BPN dan Kepolisian yang bertugas untuk melakukan pencegahan dan pemberantasan mafia tanah. Namun fakta di lapangan membuktikan masih maraknya mafia tanah yang terjadi di Kabupaten Kampar.

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui penyebab sering munculnya praktik mafia tanah dan efektivitas hukum Satuan Tugas Mafia Tanah dalam upaya memberantas mafia tanah di Kabupaten Kampar Provinsi Riau. Metode pendekatan yuridis empiris dengan spesifikasi penelitian preskriptif analisis. Data yang dikumpulkan terdiri dari data primer, yang diperoleh langsung melalui penelitian lapangan, serta data sekunder berfungsi untuk melengkapi data primer. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan penarikan kesimpulan secara induktif.

Hasil penelitian tentang penyebab munculnya mafia tanah yaitu karena lemahnya pengawasan, kurangnya kesadaran masyarakat serta transparansi. Upaya yang dilakukan Satgas Mafia Tanah untuk memberantas mafia tanah dari sisi Kantor Pertanahan ialah dengan mewujudkan percepatan PTSL sehingga terhindar dari konflik pertanahan termasuk mafia tanah, dan upaya Kepolisian Resor Kampar dengan penegakan hukum yang tegas, strategi *top down* dan *bottom-up* dimulai dari masyarakat dan pemerintah desa/kelurahan. Efektivitas Satgas Mafia Tanah dalam upaya memberantas praktik mafia tanah belum berjalan secara efektif karena mafia tanah masih terus terjadi di Kabupaten Kampar.

Kesimpulannya bahwa kurangnya kesadaran masyarakat dalam melakukan pendaftaran dan pengecekan kepemilikan hak atas tanah, pihak-pihak tertentu yang menyalahgunakan hak dan kewenangannya yang menyebabkan munculnya mafia tanah, serta Satgas Mafia Tanah belum berperan secara efektif. Diharapkan pemerintah dapat meningkatkan transparansi dan kolaborasi yang melakukan evaluasi berkala terhadap kinerja Satgas Mafia Tanah dan pihak-pihak terkait.

Kata Kunci : Efektivitas, Satuan Tugas, Pemberantasan Mafia Tanah

ABSTRACT

Land mafia is a land crime involving a group of people who work together to own, control land belonging to others illegally. The perpetrators use illegal methods that are carried out in a planned, neat, and systematic manner. Based on Technical Guidelines No. 01/JUKNIS/D.VII/2018 concerning the Prevention and Eradication of Land Mafia or abbreviated as the Land Mafia Task Force is a team formed in an integrated manner consisting of members from the Ministry of ATR/BPN and the Police whose task is to prevent and eradicate land mafia. However, the facts on the ground prove that land mafia is still rampant in Kampar Regency.

The purpose of this study was to determine the causes of the frequent emergence of land mafia practices and the effectiveness of the Land Mafia Task Force law in efforts to eradicate land mafia in Kampar Regency, Riau Province. The empirical legal approach method with prescriptive analysis research specifications. The data collected consists of primary data, which is obtained directly through field research, and secondary data serves to complement the primary data. Data analysis was carried out qualitatively by drawing conclusions inductively.

The results of the study on the causes of the emergence of land mafia are due to weak supervision, lack of public awareness and transparency. The efforts made by the Land Mafia Task Force to eradicate land mafia from the Land Office side are by realizing the acceleration of PTSL so that it can avoid land conflicts including land mafia, and the efforts of the Kampar Police with strict law enforcement, top-down and bottom-up strategies starting from the community and village/district governments. The effectiveness of the Land Mafia Task Force in eradicating land mafia practices has not been effective because land mafia continues to occur in Kampar Regency.

The conclusion is the lack of public awareness in registering and checking land ownership rights, the existence of certain parties who abuse their rights and authority has led to the emergence of land mafia, and the Land Mafia Task Force has not played an effective role. It is hoped that the government can improve transparency and collaboration by conducting periodic evaluations of the performance of the Land Mafia Task Force and related parties.

Keywords: *Effectiveness, Task Force, Eradication of Land Mafia*